



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 01 Juli 2021

Halaman: 2

► MAL PELAYANAN PUBLIK

Ngurus Aneka Perizinan di Kota Jogja Tak Lagi Ribet



Dari kiri: Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan Kapolresta Jogja Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, saat memberikan testimoni Mal Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Jogja memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) setelah diresmikan pada Rabu (30/6). Keberadaan MPP tersebut mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai macam perizinan dan tetek bengek urusan administratif karena semua instansi yang terlibat diposisikan di satu atap pada MPP tersebut. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Ujang Hasanudin.

Agung, 23, salah satu warga Jogja merasa dipermudah saat mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di MPP Jogja. Ia cukup mendatangi

satu loket saja, kemudian tidak sampai lima menit selesai pengurusan. "Alhamdulillah cepat dan pelayanan ramah," ucap Agung di MPP, Rabu.

Selain pengurusan pajak, di MPP ada 19 instansi, di antaranya seperti anjungan Bank BPD DIY, Imigrasi, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polresta Jogja, Samsat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), KPP Pratama, Kantor Pertanahan, dan Bea dan Cukai.

"Masyarakat cukup memasukkan berkas yang diajukan dalam satu loket, selanjutnya berkas yang berjalan

sementara pengguna pelayanan tinggal menunggu perizinan jadi," kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, saat peresmian MPP.

Hadir dalam peluncuran MPP Kota Jogja tersebut Kapolresta Jogja Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPST), Nur Widihartana, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuriadijaya. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti juga sempat hadir dalam pembukaan MPP tersebut dan memberikan testimoni.

► Halaman 10

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐

Ngurus Aneka...

Heroe mengatakan kantor dulu yang melayani satu atap seluruh perizinan saat ini menjadi MPP sebagai bagian respons perubahan paradigma pertanggungjawaban birokrasi. Hal ini dilakukan agar proses perizinan betul-betul bisa dijaga akuntabilitasnya.

Meskipun pengurusan perizinan dikembalikan pada instansi masing-masing, tetapi MPP tak mengurangi kecepatan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan terhadap semua hal.

"Meski saat ini dalam melayani masyarakat dikembalikan pada dinas masing-masing, tapi di MPP kami gunakan sistem tak lagi orang jalan dari loket ke loket tapi di MPP yang jalan adalah berkasnya. Orang dapat layanan memasukkan dalam satu loket tinggal menunggu. Jika lengkap langsung dapat perizinan tapi kalau belum lengkap diselesaikan ke loket lainnya," ujar Heroe.

Menurut Heroe, hal tersebut untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Masyarakat tak perlu lagi berpindah pindah kantor tapi hanya ada satu tempat dan hanya memasukkan dari satu loket.

Ia berharap instansi vertikal yang terlibat dalam pelayanan publik di Jogja bisa bergabung semua. MPP, kata dia, diharapkan

menjadi titik pertemuan semua layanan instansi terkait, termasuk instansi perbankan.

Ke depannya, Pemkot Jogja juga ingin semua pelayanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tidak perlu lagi fotokopi KTP dan kartu keluarga dalam mengurus perizinan.

"Tidak semua layanan di instansi urus surat kadang memerlukan foto, maka di sini siapkan tempat untuk foto berkaitan dengan layanan instansi terkait. MPP tak hanya jadi tempat memproses [berkas]. Ada Koperasi Wiwara, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kami ingin ciptakan MPP betul betul MPP nyaman bagi warga Jogja," ucap Heroe.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan MPP yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri PAN-RB No.23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemkot Jogja memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Pelayanan pada MPP diharapkan tak hanya mudah, cepat, serta memiliki prosedur jelas, tetapi juga merupakan *one stop services* atau satu tempat tujuan yang menyediakan berbagai layanan.

Dengan demikian, masyarakat tak perlu mobilitas tinggi untuk dapat menikmati berbagai layanan tetapi cukup pergi ke satu tempat saja. "Selayaknya

mal yang biasa kita temui dalam aktivitas komersial, MPP Jogja yang menghadirkan 19 unit anjungan pelayanan, juga dilengkapi fasilitas penunjang musala, minimarket, tempat bermain serta ruang laktasi yang bersih dan nyaman," kata Haryadi.

Kualitas Pelayanan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa, dalam sambutannya melalui daring mengapresiasi komitmen Pemkot Jogja dalam menjaga kualitas pelayanan publik bahkan meningkat sekalipun dalam kondisi pandemi. "Semoga MPP Jogja bisa memberikan manfaat dan jadi kebanggaan warga Jogja," kata dia.

Menurut Diah, pada era disrupsi, pemerintah tak boleh bergerak lambat tetapi harus terus berinovasi. Percepatan pelayanan publik dibutuhkan dan didukung birokrasi baik, bersih, sederhana, fleksibel, dan SDM aparatur berkualitas. Masa pandemi merupakan proses pembelajaran tiap orang untuk melakukan perubahan dan beradaptasi.

"MPP Jogja diharapkan jadi salah satu penggerak roda perekonomian setempat tetapi tetap dengan disiplin protokol kesehatan. MPP gerbang utama kemudahan usaha," kata Diah.

(hasanudin@harianjogja.com).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005